

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perdagangan Internasional

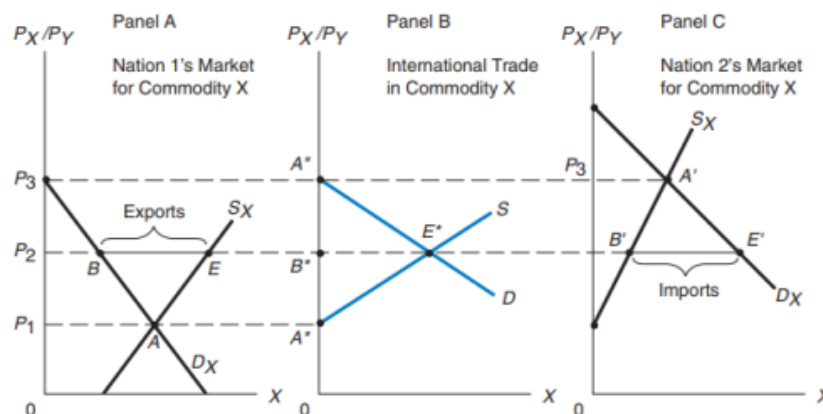
Perdagangan internasional dalam arti sempit mengacu pada kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara yang dikenal sebagai aktivitas impor dan ekspor. Dalam perkembangannya, aktivitas ini tidak hanya mencakup ekspor dan impor, tetapi juga perdagangan modal yang mencakup pertukaran aset berisiko seperti saham, obligasi hingga valuta asing (Wulandari & Zuhri, 2019). Perdagangan internasional dapat memberi kemudahan bagi suatu negara untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan. Selain itu, perdagangan internasional memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian seperti peningkatan pendapatan negara, menarik investasi hingga memperluas ketersediaan lapangan kerja.

Impor dan ekspor merupakan wujud yang terlihat nyata dari aktivitas perdagangan internasional. Ekspor dapat diartikan sebagai kegiatan penjualan ataupun pengiriman barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri (Pratama et al., 2022). Sebaliknya, impor mengacu pada kegiatan pembelian serta pemasukan barang atau jasa ke dalam negeri dari luar negeri. Aktivitas impor dan ekspor

merupakan tanda dari kemajuan pada perekonomian (Azzahra et al., 2022). Dari sisi ekonomi, impor akan meningkatkan pengeluaran konsumsi pada area domestik sementara ekspor dapat mendorong produksi dalam negeri.

Salvatore (2013) menyusun model perdagangan internasional berdasarkan kesetimbangan parsial dari masing-masing negara yang kemudian membangun kesetimbangan global. Proses perdagangan beserta pembentukan harga dapat dilihat dari grafik pada Gambar II.1.

Gambar II. 1 Gambaran Terjadinya Perdagangan Internasional



Sumber: Salvatore (2013)

Panel A menunjukkan kondisi penawaran dan permintaan barang X pada negara 1. Permintaan dan penawaran barang X di Negara 1 membentuk ekuilibrium pada titik A dengan harga pada tingkat P_1 . Di sisi lain, Panel C menunjukkan permintaan dan penawaran barang X di Negara 2. Permintaan dan penawaran atas barang X di Negara 2 membentuk titik ekuilibrium A' dengan harga pada P_3 dengan nilai $P_3 > P_1$. Pada kondisi perdagangan internasional yang terbuka, harga barang X di pasar internasional akan berada di antara P_1 dan P_3 . Karena harga internasional

(P2) lebih tinggi daripada harga di Negara 1 (P1), penawaran barang X dari Negara 1 akan mengalami peningkatan. Sementara itu di Negara 2 harga barang X (P3) yang lebih tinggi dibandingkan harga internasional akan cenderung meningkatkan permintaan atas barang tersebut di Negara 2. Kelebihan penawaran dari Negara 1 akan bertemu dengan kelebihan permintaan dari Negara 2 pada perdagangan internasional dalam bentuk kegiatan ekspor-impor sebagaimana digambarkan pada Panel B. Penawaran ekspor dan permintaan impor tersebut akan membentuk ekuilibrium perdagangan internasional di titik E' pada tingkat harga P2.

Sejak tahun 1776, Adam Smith melalui bukunya *The Wealth of Nations* telah membawa gagasan mengenai pentingnya liberalisasi perdagangan bagi kemakmuran suatu negara (Mankiw, 2016). Smith menggagas Teori Keunggulan Absolut yang menjelaskan bahwa suatu negara harus melakukan spesialisasi produksi pada komoditas yang dapat mereka produksi dengan lebih efisien dari negara-negara lain. Gambaran konsep teori ini dapat dilihat dari Tabel II.1 sebagaimana berikut.

Tabel II. 1 Gambaran Teori Keunggulan Absolut

Komoditas	Indonesia	Amerika Serikat
Kopi	3 tenaga kerja/ unit	5 tenaga kerja/ unit
Kedelai	4 tenaga kerja/ unit	2 tenaga kerja/ unit

Sumber: diolah penulis

Dari tabel II.1, dapat dipahami bahwa Indonesia memproduksi kopi dengan lebih efisien daripada Amerika Serikat. Ini disebabkan Indonesia yang

membutuhkan tenaga kerja lebih sedikit untuk memproduksi produk yang sama dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal sebaliknya berlaku untuk komoditas kedelai dimana Amerika Serikat mampu memproduksinya dengan lebih efisien daripada Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi kopi dibandingkan Amerika Serikat dan Amerika Serikat memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi kedelai dibandingkan Indonesia.

Setelah teori keunggulan absolut, kemudian berkembang teori selanjutnya yakni teori keunggulan komparatif yang dikemukakan David Ricardo (Mankiw, 2016). Teori ini juga menjelaskan manfaat perdagangan internasional dengan prinsip yang berbeda. Menurut teori ini, perdagangan lebih bergantung pada keunggulan komparatif ketimbang keunggulan absolut (Atmanti, 2017). Suatu negara semestinya memfokuskan kegiatan ekonominya pada komoditas yang paling kompetitif secara internasional meskipun tidak unggul secara absolut. Gambaran konsep keunggulan komparatif disajikan pada Tabel II.2 sebagaimana berikut.

Tabel II. 2 Gambaran Teori Keunggulan Mutlak

Komoditas	Jepang	Malaysia
Kulkas	3 tenaga kerja/ unit	4 tenaga kerja/ unit
Sepeda Motor	2 tenaga kerja/ unit	5 tenaga kerja/ unit

Sumber: diolah penulis

Terlihat pada Tabel II.2 bahwa Jepang memiliki keunggulan absolut dari Malaysia dalam memproduksi kulkas ataupun sepeda motor. Dengan demikian berdasarkan teori keunggulan absolut, Malaysia tidak akan melakukan ekspor ke

Jepang. Namun, berdasarkan teori keunggulan komparatif, Malaysia tetap dapat melakukan ekspor ke Jepang. Dari kedua komoditas tersebut, Malaysia memiliki keunggulan relatif yang lebih baik pada produk kulkas. Dalam memproduksi jam kulkas, Malaysia memiliki tingkat efisiensi $3/4$ kali Jepang sementara dalam memproduksi sepeda motor, tingkat efisiensinya hanya $2/5$ kali. Maka dari itu, Malaysia akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi kulkas. Sebaliknya Jepang yang memiliki keunggulan komparatif yang lebih besar dengan memproduksi sepeda motor akan melakukan spesialisasi pada produksi sepeda motor.

Teori klasik perdagangan internasional termasuk teori keunggulan absolut Adam Smith dan teori keunggulan komparatif David Ricardo masih memiliki berbagai keterbatasan. Salah satu dari keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah penggunaan asumsi bahwa sumber daya dapat berpindah secara sempurna dari satu industri ke industri lain dalam suatu negara. Realita yang dihadapi tentu tidak demikian. Selain itu, teori-teori klasik tersebut juga tidak mempertimbangkan beberapa aspek seperti biaya transportasi, skala ekonomi dan faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi pola perdagangan. Terdapat juga penggunaan asumsi lain yang tidak sesuai dengan kenyataan seperti bahwa semua negara memiliki teknologi dan faktor produksi yang sama. Didasari kelemahan-kelemahan dari teori klasik tersebut, lahirlah teori perdagangan internasional yang lebih modern.

Model Heckscher-Ohlin hadir sebagai teori modern yang menggabungkan konsep keunggulan komparatif dengan perbedaan faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara (Leamer, 1995). Pemikiran dasar dari model ini adalah bahwa

komoditas yang diperdagangkan sangat bergantung pada faktor-faktor yang dimiliki suatu negara seperti tanah, tenaga kerja dan modal. Model ini memprediksi jika suatu negara akan melakukan spesialisasi untuk memproduksi barang yang secara intensif menggunakan faktor produksi lokal secara berlimpah. Kemudian terhadap barang tersebut akan dilakukan ekspor. Sebaliknya suatu negara akan cenderung mengimpor barang yang membutuhkan faktor produksi yang langka untuk diperoleh di negara tersebut. Sebagai contoh, negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia yang kaya akan faktor produksi tenaga kerja akan mengekspor barang yang padat karya. Sementara negara yang memiliki sedikit lahan seperti Singapura akan cenderung mengimpor barang yang padat lahan.

Namun, model Heckscher-Ohlin mendapat kritikan atas ketidakmampuannya menjelaskan sejumlah kejadian empiris seperti banyaknya perdagangan yang terjadi di antara negara-negara dengan kekayaan faktor yang serupa (Leamer, 1995). Terdapat pula fenomena di mana negara dengan sumber daya yang lebih sedikit justru lebih makmur ketimbang negara dengan sumber daya melimpah. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori yang lebih baru yakni teori keunggulan kompetitif yang dikembangkan Porter. Porter menyampaikan gagasan bahwa daya saing suatu negara bergantung pada kemampuan industrinya untuk berinovasi dan berkembang (Porter, 1990). Teori ini menghadirkan gagasan bahwa terdapat aspek di luar faktor-faktor produksi yang berperan dalam meningkatkan daya saing suatu negara. Tentu kebijakan pemerintah memiliki peranan penting sebagai katalis untuk mendorong daya saing industri.

2.1.2 Fasilitas Fiskal, Fasilitas KITE dan KITE Pengembalian

Fasilitas fiskal merujuk kepada berbagai kemudahan di bidang perpajakan yang diberikan pemerintah untuk mendorong tercapainya tujuan tertentu yang diharapkan oleh pemerintah. Menurut *Black Law Dictionary*, insentif pajak merupakan bentuk penawaran yang diberikan pemerintah, dengan memberikan manfaat pajak, untuk melakukan aktivitas tertentu seperti kontribusi uang ataupun properti untuk kegiatan amal terqualifikasi (Hasibuan, 2016). Dikutip dari sumber yang sama, Spitz (1972, dikutip dalam Hasibuan, 2016) mengatakan bahwa secara umum terdapat beberapa bentuk fasilitas perpajakan yakni: pengecualian pengenaan, penangguhan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, hingga reduksi tarif pajak.

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah atas pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat berupa peningkatan investasi, mendorong riset dan penelitian hingga tujuan-tujuan lain termasuk peningkatan ekspor yang menjadi tujuan pemberian fasilitas KITE. Apabila mengacu pada bentuk-bentuk fasilitas perpajakan menurut Spitz tersebut, maka fasilitas KITE dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pengecualian atas pengenaan pajak. Dalam perkembangannya, fasilitas KITE awalnya dikenal sebagai *drawback system* (Gumilar et al., 2015). Istilah ini juga kerap digunakan pada negara-negara lain. Ketentuan *Kyoto Convention* menyebut *drawback* sebagai salah satu dari beberapa prosedur yang digunakan suatu negara untuk mempromosikan ekspor (World Trade Organization, 2003). Mekanisme *drawback* dilakukan dalam bentuk pengembalian pungutan dan pajak-pajak atas impor barang yang digunakan dalam pengolahan

barang ekspor, material yang digunakan untuk membentuk suatu barang ekspor ataupun barang yang diekspor kembali dalam kondisi yang sama. Pada prinsipnya, WTO memperbolehkan penerapan mekanisme *drawback* ini dengan mengikuti beberapa ketentuan yang telah diatur.

Fasilitas KITE diberikan dengan tujuan utama agar terjadi peningkatan kinerja ekspor walaupun dengan kompensasi berkurangnya penerimaan negara dari bea masuk maupun Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) (Nabila & Sriyanto, 2018). Fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah untuk mendorong ekspor selain fasilitas KITE adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB). KB merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah Indonesia yang mengizinkan perusahaan menyimpan barang impor dan/atau barang lain dari dalam negeri untuk diolah ataupun digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk pemakaian dalam negeri (Situmorang, 2020). Dari sisi pengeluaran barang, terdapat perbedaan mendasar bahwa barang dari perusahaan KB dapat diekspor maupun dimasukkan ke dalam negeri sementara ketentuan pengeluaran barang perusahaan KITE tergantung pada jenis fasilitas KITE yang digunakan. Apabila suatu barang diimpor perusahaan KITE Pembebasan dengan skema fasilitas tersebut maka barang tersebut wajib diekspor. Berbeda dengan perusahaan KITE Pengembalian yang dapat memilih untuk mengekspor barangnya dan memperoleh pengembalian atau memasukkannya ke dalam negeri.

Peraturan yang mendasari pemberian fasilitas KITE adalah Pasal 26 huruf k Undang-undang Kepabeanan yang membuka kemungkinan diberikannya pembebasan ataupun keringanan bea masuk terhadap impor barang dan bahan

dengan tujuan pengolahan, perakitan atau pemasangan pada barang lain yang kemudian akan diekspor. Fasilitas KITE dibagi menjadi KITE Pembebasan, KITE Pengembalian dan KITE IKM. Ketentuan mengenai fasilitas KITE Pembebasan dan KITE IKM saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.04/2022. Sementara KITE Pengembalian diatur dengan PMK Nomor 145/PMK.04/2022.

Mengacu pada PMK Nomor 145/PMK.04/2022, KITE Pengembalian diartikan sebagai fasilitas fiskal berupa pengembalian bea masuk atas impor atau pemasukan barang yang mengalami pengolahan, perakitan atau pemasangan yang menghasilkan nilai tambah dan dilakukan ekspor. Selain diimpor dari luar negeri, pemasukan barang ke perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian juga dapat dilakukan dari Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Pusat Logistik Berikat, Kawasan Bebas maupun Kawasan Ekonomi Lainnya. Pengeluaran dari perusahaan KITE Pengembalian selain ekspor dapat dilakukan penyerahan ke Pusat Logistik Berikat. Dalam rangka memperoleh pengembalian bea masuk, perusahaan yang telah melakukan ekspor dengan fasilitas KITE Pengembalian dapat mengajukan penerbitan Laporan Hasil Penelitian Rekonsiliasi Ekspor (LHPRE). Setelah LHPRE terbit, perusahaan kemudian mengajukan permohonan pengembalian bea masuk dengan melampirkan laporan penggunaan barang maupun bahan yang diajukan pengembalian bea masuk (BCL.KT-02).

2.1.3 PDB

Produk Domestik Bruto (PDB) sering dianggap sebagai ukuran terbaik dalam mengetahui sebaik apa performa ekonomi suatu negara (Mankiw, 2016). PDB memberikan informasi mengenai total pendapatan dan total belanja atas total output pada negara tersebut. Lebih lanjut, Mankiw menjelaskan bahwa PDB merupakan salah satu dari tiga statistik ekonomi yang paling banyak diteliti baik oleh pembuat kebijakan maupun para ekonom.

Penghitungan nilai PDB melibatkan proses penjumlahan atas nilai semua produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara. Terdapat tiga pendekatan dalam menghitung nilai PDB yakni pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi dilakukan dengan menambahkan nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di negara itu. Pendekatan pendapatan dilakukan dengan menjumlahkan semua pendapatan yang dihasilkan oleh rumah tangga serta perusahaan di negara tersebut. Sementara pada pendekatan belanja, dilakukan penjumlahan semua pengeluaran terhadap barang dan jasa di negara tersebut. Komponen yang dijumlahkan adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta net ekspor.

Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, PDB menggambarkan kemampuan produksi suatu negara. Peningkatan PDB menjadi indikator kondisi perekonomian yang baik di negara tersebut (Hidayat et al., 2017). Kondisi yang baik tersebut mendukung kemampuan produksi yang lebih efektif dan efisien. Peningkatan efektifitas dan efisiensi ini sesuai dengan prinsip skala ekonomi (*economies of scale*) dimana ketika ekonomi bergerak dalam skala yang

lebih besar, akan terjadi penurunan biaya produksi karena biaya bahan baku, tenaga kerja dan sumber daya lainnya terbagi dalam jumlah produksi yang lebih besar. Dengan demikian, industri dalam negeri akan memiliki daya saing internasional yang baik. Peningkatan PDB juga dapat menghadirkan kelebihan produk yang tidak terserap oleh pasar dalam negeri dan dijual ke luar negeri.

2.1.4 Inflasi

Indikator ekonomi lain yang menjadi perhatian utama pembuat kebijakan adalah inflasi. Inflasi merupakan peningkatan tingkat harga barang dan jasa pada suatu sistem ekonomi secara keseluruhan (Mankiw, 2016). Persentase perubahan harga ini diukur dengan tingkat inflasi yang secara bersamaan mengukur penurunan daya beli. Teori Keynes menjelaskan bahwa inflasi merupakan dampak dari keinginan yang berlebihan suatu kelompok masyarakat dalam memanfaatkan barang dan jasa (Simanungkalit, 2020). Inflasi dapat disebabkan oleh terjadinya penambahan jumlah permintaan ataupun peningkatan pada biaya produksi (Okon et al., 2023). Inflasi yang disebabkan peningkatan jumlah permintaan disebut *demand pull inflation*. Sementara inflasi yang disebabkan peningkatan biaya produksi dikenal sebagai *cost push inflation*.

Inflasi kerap dipandang sebagai suatu hal yang merugikan karena menggerus kekayaan, namun inflasi pada level yang moderat memiliki manfaat bagi perekonomian seperti peningkatan fungsi pasar tenaga kerja (Mankiw, 2016). Inflasi tidak selalu berdampak negatif terhadap perekonomian terlebih jika inflasi terkategori ringan (Simanungkalit, 2020). Sebaliknya, inflasi ringan dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi karena memberikan semangat pada pelaku usaha untuk meningkatkan produksi.

Peningkatan harga yang disebabkan oleh inflasi dapat meningkatkan harga bahan baku ataupun bahan penolong produksi yang berasal dari dalam negeri (Puspitasari & Fachrudin, 2020). Kenaikan harga ini akan berdampak pada peningkatan harga produksi secara keseluruhan. Karena hal itu, harga jual barang akan menjadi lebih tinggi dan sulit bersaing pada pasar internasional.

2.1.5 Nilai Tukar

Nilai tukar antara mata uang dua negara menentukan harga yang dibayarkan oleh penduduk kedua negara saat melakukan transaksi perdagangan (Mankiw, 2016). Ekonom membagi nilai tukar ke dalam dua jenis; nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal merupakan harga relatif mata uang antara dua negara. Contohnya jika nilai tukar Dollar Amerika Serikat (USD) terhadap Rupiah Indonesia (IDR) adalah IDR 15.000 per USD maka warga Indonesia yang membutuhkan 1 USD harus menukarnya dengan uang sejumlah IDR 15.000 begitu juga sebaliknya. Sementara nilai tukar riil adalah harga relatif antar komoditas pada dua negara. Nilai ini membandingkan jumlah barang yang dapat diperoleh pada masing-masing negara dengan membayar nilai uang yang sama. Sesuai prinsip dasar ekonomi, secara sederhana nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran atas mata uang tersebut di pasar mata uang asing.

Model *Mundell-Flemming* menjelaskan pengaruh nilai tukar terhadap perdagangan internasional. Dijelaskan bahwa penurunan nilai tukar membuat harga

barang lokal menjadi relatif lebih murah bagi negara lain sehingga terjadi peningkatan ekspor (Mankiw, 2016). Demikian pula sebaliknya, harga barang dari negara lain menjadi relatif lebih mahal sehingga terjadi penurunan pada intensitas impor.

Teori lain menjelaskan bahwa depresiasi nilai tukar mata uang dapat meningkatkan kinerja neraca perdagangan dengan syarat terpenuhinya *Marshall-Lerner Condition* (MLC) (Dong, 2017). MLC adalah sebuah konsep ekonomi yang menyatakan jika semua hal lain tetap, depresiasi nilai tukar mata uang akan meningkatkan neraca perdagangan jika ekspor dan impor negara itu cukup elastis. Jika elastisitas ekspor-impor cukup tinggi untuk memenuhi MLC, maka efek volume mendominasi dimana volume ekspor meningkat dan volume impor berkurang sehingga neraca transaksi berjalan (*current account*) membaik (Piersanti, 2016). Sebaliknya, jika efek harga yang mendominasi, impor akan menjadi lebih mahal dan ekspor menjadi lebih murah, dampaknya neraca transaksi berjalan akan memburuk.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Selain di Indonesia, penelitian tentang fasilitas fiskal untuk mempromosikan ekspor juga dilakukan di negara lain. Simulasi dengan model *Computable General Equilibrium* (CGE) memberikan hasil bahwa kebijakan duty drawback dan *Value Added Tax* (VAT) *Rebate* secara umum meningkatkan ekspor di China (CHAO et al., 2006). Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian kecil peningkatan ekspor berasal dari penurunan aktivitas ekonomi domestik dan sebagian besar dari

akses bahan impor yang lebih murah. Ditemukan juga bahwa penggunaan bahan asal impor lebih banyak daripada bahan asal dalam negeri. Disimpulkan bahwa kebijakan ini secara umum meningkatkan kesejahteraan di negara tersebut.

Penelitian Mah (2007a) menguji efektivitas sistem *duty drawback* dalam rangka mempromosikan ekspor di China dengan mempertimbangkan permintaan ekspor dan penawaran ekspor. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa *duty drawback* tidak signifikan dalam mendorong promosi ekspor di China. Administrasi yang inefisien seperti praktik pelaporan yang salah mungkin menyebabkan ketidakefektifan fasilitas ini. Penelitian ini menyarankan agar negara-negara berkembang mengembangkan sistem *monitoring* yang memadai atas prosedur *duty drawback* yang berlaku. Sementara di Korea *duty drawback* ditemukan efektif karena sistem administrasinya yang efisien dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh WTO (Mah, 2007b). Hasil penelitian tersebut juga menemukan bahwa dampak ekspor antar jenis barang dapat berbeda-beda.

Penelitian Lubis (2010) dilakukan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi ekspor Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa ekspor Indonesia ke sepuluh negara mitra utama bersifat dinamis dan dipengaruhi kondisi ekonomi dunia. Salah satu faktor yang memengaruhi kinerja ekspor di sektor pertanian adalah impor bahan baku dan bahan penolong. Pengaruh yang diberikan oleh faktor ini bersifat positif dan signifikan.

Penelitian di Turki juga menemukan hasil bahwa ditemukan hubungan kausalitas searah dari PDB terhadap ekspor pada periode tahun 1980 sampai tahun 2012 (Aydin & Sari, 2014). Penelitian ini menggunakan uji *Augmented Dickey*

Fuller (ADF) dan uji *Granger Causality*. Ekspor di Turki telah dipahami sebagai variabel yang mempengaruhi PDB seperti yang diperkirakan.

Nilai tukar tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap performa ekspor di Ghana (NYEADI et al., 2014). Penelitian ini menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi ekspor di negara tersebut adalah PDB, tabungan bruto nasional (Gross National Saving/ GNS), pertumbuhan impor dan total investasi. Disarankan agar pembuat kebijakan tidak terlalu berkonsentrasi pada pengendalian nilai tukar dan inflasi tapi lebih memperhatikan upaya peningkatan PDB dan GNS.

Selain pengaruh yang diukur dengan metode kuantitatif, terdapat juga penelitian yang mempelajari fasilitas KITE secara kualitatif. Penelitian (Gumilar et al., 2015) dilakukan untuk mempelajari proses penggunaan fasilitas KITE, pengawasan, pemanfaatan, perubahan jumlah perusahaan penerima fasilitas hingga perbandingan kinerja ekspor setelah memperoleh fasilitas. Penelitian ini menemukan beberapa kendala dalam pemenuhan syarat penggunaan *IT Inventory* dan berkurangnya pengguna fasilitas KITE yang beralih memanfaatkan *free trade agreement* (FTA) yang lebih mudah. Sementara peningkatan ekspor setelah memperoleh fasilitas juga terlihat dari laporan tahunan perusahaan.

Penelitian Hidayat et al. (2017) juga turut mengkaji pengaruh faktor-faktor ekonomi makro terhadap ekspor Indonesia. Variabel independen yang diteliti pada penelitian ini juga ekspor non migas Indonesia dengan periode waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini menemukan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor non migas sementara nilai tukar memberikan pengaruh negatif.

Penelitian Anshari et al. (2017) menguji pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap performa ekspor negara-negara ASEAN-5. Hasil penelitian ini menemukan bahwa depresiasi nilai tukar memberi pengaruh negatif pada ekspor di Indonesia, Singapura dan Malaysia namun pengaruhnya positif di Filipina dan tidak berpengaruh signifikan di Thailand. Sementara variabel inflasi memiliki pengaruh positif atas ekspor di Filipina namun tidak berpengaruh signifikan di keempat negara lainnya.

Penelitian lain dilakukan untuk menganalisis pengaruh nilai tukar dan inflasi terhadap performa ekspor ikan hias di Bali pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2015. Khoironi & Saskara (2017) menemukan bahwa nilai tukar memberikan pengaruh positif dan signifikan. Sementara inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor tersebut.

Nabila & Sriyanto (2018) melakukan penelitian mengenai manfaat pemberian fasilitas KITE pada kinerja ekspor pada 45 perusahaan penerima fasilitas KITE. Penelitian ini mengkaji hubungan nilai fasilitas fiskal yang diberikan, nilai impor bahan baku dan bahan penolong, perubahan kebijakan dan nilai tukar terhadap kinerja ekspor perusahaan. Hasil yang didapat antara lain: pengaruh positif diberikan oleh nilai fasilitas dan nilai tukar, pengaruh negatif diberikan oleh nilai impor, sementara perubahan kebijakan tidak memberikan pengaruh signifikan.

Penelitian dengan metode *Autoregressive Distributed Lagged* (ARDL) menemukan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kebijakan *duty drawback* tidak berkontribusi terhadap peningkatan ekspor di Zambia (Msoni, 2018). Hal ini dapat disebabkan oleh perilaku mencari rente dari perusahaan-

perusahaan eksportir serta sistem administrasi yang inefisien. Pemrosesan pengembalian masih dilakukan secara manual sehingga terdapat potensi terjadinya korupsi dan kolusi. Terlebih, sejumlah barang ekspor yang memanfaatkan fasilitas ini masih berada dalam bentuk setengah jadi. Pemerintah Zambia disarankan untuk memperbaiki prosedur dan administrasi fasilitas ini.

Terdapat jenis fasilitas KITE yang ditujukan untuk perusahaan kecil dan menengah yang disebut sebagai KITE Industri Kecil dan Menengah (IKM). Mumpuni (2019) menjelaskan bahwa fasilitas KITE IKM memiliki kemiripan dengan fasilitas KITE Pembebasan yang diberikan untuk perusahaan yang termasuk industri kecil, industri menengah, gabungan industri kecil atau menengah, perusahaan yang ditunjuk oleh beberapa perusahaan di sentra yang sama serta koperasi. Penelitian Mumpuni (2019) tersebut kemudian menjelaskan lebih lanjut potensi pemanfaatan fasilitas KITE IKM di Magelang. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi fasilitas ini pada tingkat nasional menunjukkan peningkatan kinerja ekspor dan efisiensi pengeluaran biaya. Penguatan regulasi pada 2019 memberi perluasan kesempatan penggunaan fasilitas KITE IKM. Untuk itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelatihan dari instansi vertikal Kementerian Keuangan juga menjadi suatu hal yang diperlukan.

Mahendra & Irsad (2019) dalam penelitiannya menguji pengaruh variabel ekonomi makro terhadap kinerja ekspor pada industri pengolahan di Indonesia. Hasil pengujian menemukan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif pada kinerja ekspor sementara nilai tukar memberikan pengaruh

negatif. Penelitian ini juga menghasilkan temuan bahwa nilai tukar tidak mampu memoderasi pengaruh variabel-variabel independen tersebut.

Industri tekstil memiliki ketergantungan atas impor bahan baku sehingga dibutuhkan fasilitas KITE untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing industri dalam negeri di pasar internasional (Puspitasari & Fachrudin, 2020). Penelitian tersebut mencoba mengetahui dampak fasilitas KITE, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tingkat inflasi terhadap performa ekspor 37 perusahaan tekstil penerima fasilitas KITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa performa ekspor perusahaan mendapat pengaruh positif dari pemberian fasilitas, sementara inflasi dan nilai tukar memberikan pengaruh negatif.

Septina (2020) melalui penelitiannya berupaya melakukan eksplorasi atas faktor-faktor ekonomi makro yang memberi pengaruh terhadap kinerja ekspor non migas di Indonesia. Penelitian ini mengambil sampel waktu pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jangka pendek PDB, inflasi dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor non migas. Sementara dalam jangka panjang, PDB berpengaruh signifikan positif terhadap ekspor non migas sementara inflasi dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan.

Igir et al. (2020) melakukan penelitian yang menganalisis bagaimana kurs memengaruhi kinerja ekspor migas di Indonesia pada periode kuartal 1 tahun 2012 sampai dengan kuartal 4 tahun 2018. Hasil olah data menunjukkan bahwa dalam jangka pendek nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor non migas

Indonesia. Sementara dalam jangka panjang nilai tukar memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor non migas tersebut.

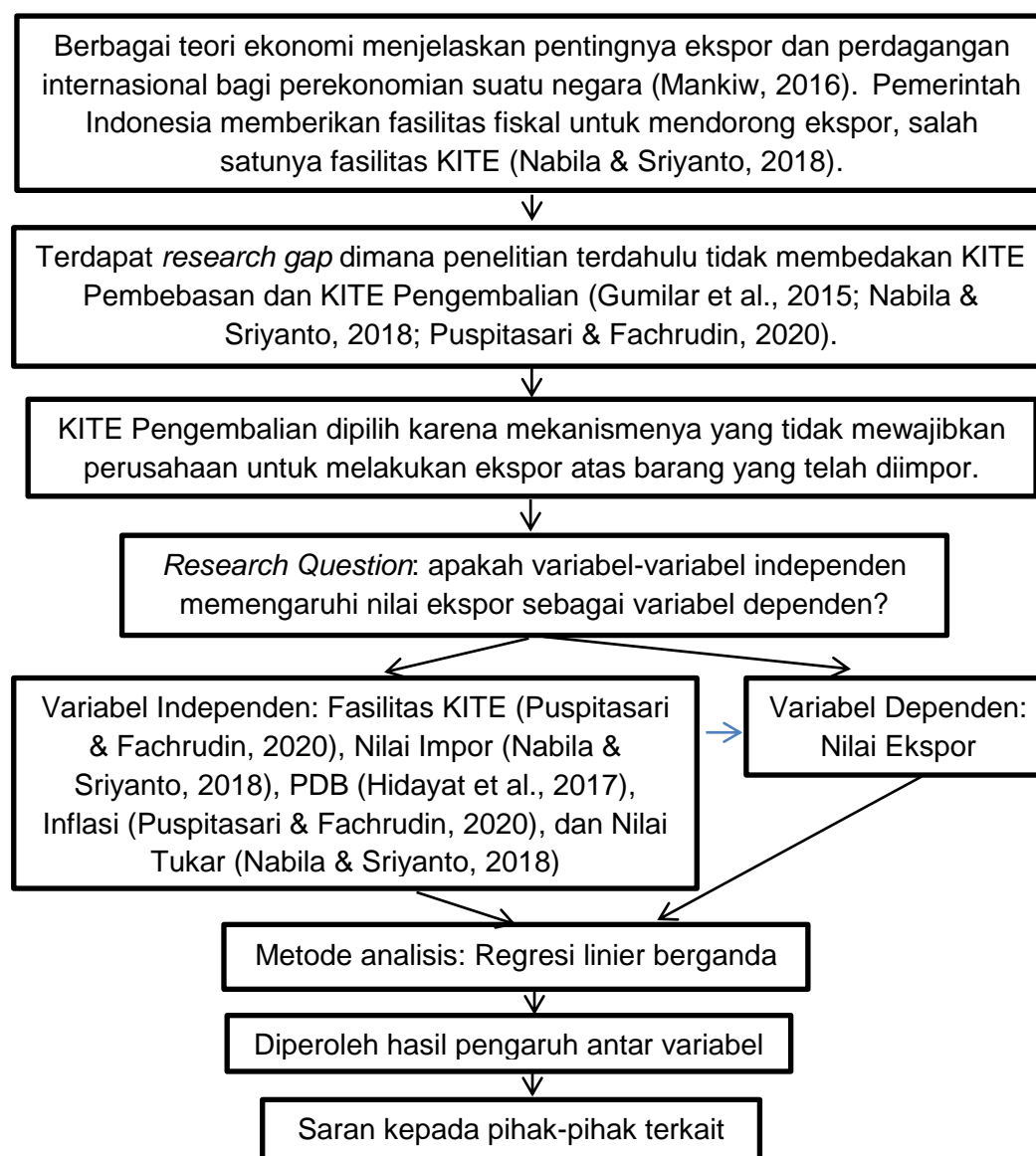
Fihri et al. (2021) melakukan penelitian yang menganalisis pengaruh PDB, inflasi dan nilai tukar terhadap kinerja ekspor karet Indonesia ke Amerika Serikat dan Tiongkok. Penelitian ini menemukan bahwa pada ekspor karet ke Tiongkok, bahwa PDB berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor, nilai tukar berpengaruh negatif, dan inflasi tidak berpengaruh signifikan. Sementara pada ekspor ke Amerika Serikat, ketiga variabel tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Selain pengaruh fasilitas KITE terhadap performa ekspor, terdapat pula penelitian yang mengukur pengaruh fasilitas KITE terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Mada & Ginanjar, 2022) mengukur bagaimana fasilitas KITE bersama-sama dengan pertumbuhan penjualan dan perputaran modal kerja (*working capital turnover*) memengaruhi profitabilitas perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan perhitungan *Return on Asset* (ROA). Objek penelitian ini adalah 42 perusahaan yang menerima fasilitas KITE pada tahun 2020. Hasil regresi menemukan bahwa semua variabel independen itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Setelah melakukan revidu atas teori serta penelitian-penelitian terdahulu, disusunlah kerangka pemikiran sebagaimana tersaji pada Gambar II.2. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk menjelaskan secara visual alur berpikir dalam proses penelitian ini.

Gambar II. 2 Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah penulis

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan hasil tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu, dapat disampaikan hipotesis sebagai berikut:

H1: Fasilitas KITE Pengembalian berpengaruh positif terhadap nilai ekspor.

H2: Nilai impor berpengaruh positif terhadap nilai ekspor.

H3: PDB berpengaruh positif terhadap nilai ekspor.

H4: Inflasi berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor.

H5: Nilai tukar berpengaruh positif terhadap nilai ekspor.